

29/01/2025

PROSES VERBAL

1. Hal : Laporan Hasil Penyusunan Laporan Kinerja dalam Rangka Mendukung Pengawasan Kegiatan PAT Lingkup Inspektorat I di Bogor
2. Unit Konseptor
 - a. Ketua Tim : HARFIYANA PRASTIWI
 - b. Pengendali Teknis : SEMBODO PAMENANG
 - c. Pengendali Mutu : SUYITNO
 - d. Inspektur I : ANDRY ASMARA
 - e. Plt. Inspektur Jenderal : TIN LATIFAH
3. Dasar Pembuatan
 - a. Surat Tugas : B.0556/RC.200/G.2/12/2024
 - b. Uraian : Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja dalam Rangka Mendukung Pengawasan Kegiatan PAT Lingkup Inspektorat I di Bogor
 - c. Tgl. Diterima : 17-01-2025

No	Keterangan	Nama	Tanggal	TTD
1	Diketik dan diserahkan oleh	ADI BRITANianto	17-01-2025	
2	Direviu dan disetujui Ketua Tim	HARFIYANA PRASTIWI	3/2/25	
3	Direviu dan disetujui Pengendali Teknis	SEMBODO PAMENANG	3/2/25	
4	Direviu dan disetujui Pengendali Mutu	SUYITNO	04/2/25	
5	Direviu dan disetujui Inspektur I	ANDRY ASMARA		
6	Direviu dan disetujui Inspektur Jenderal	TIN LATIFAH		

Tanggal	Catatan
17-01-2025	Pengajuan reviu verbal oleh ADI BRITANianto

Jakarta, 17 Januari 2025

Yang Menyetujui
Plt. Inspektur Jenderal

Tin Latifah

Yang Mengusulkan
Inspektur I



Andry Asmara

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT I 2024



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Informasi dalam laporan ini disajikan secara terintegrasi dan berkala melalui laporan kinerja triwulanan sepanjang tahun 2024. Laporan Kinerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 ini bertujuan untuk melaporkan tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian selaku pemberi mandat.

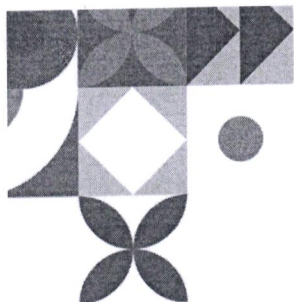
Inspektorat I secara berkelanjutan berupaya mendorong perbaikan ekonomi pertanian melalui penguatan pengawasan terhadap mitra kerja. Pada tahun 2024, sesuai tugasnya, Inspektorat I melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Apresiasi disampaikan kepada seluruh mitra kerja yang telah bekerja sama dengan Inspektorat I, termasuk Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, serta Satker DK, dan TP di seluruh Indonesia. Diharapkan kerja sama yang baik ini dapat terus berlanjut demi mewujudkan keberhasilan program Kementerian Pertanian.

Sebagai penutup, diharapkan Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat I, serta menjadi pembelajaran berharga bagi generasi mendatang mengenai upaya pengawalan dan pengawasan pembangunan pertanian yang terus dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat I.



Andry Asmara, SE. MM.
Inspektur I



Daftar Isi.....	i
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	3
1.3.1. Struktur Organisasi.....	3
1.3.2. Sumber Daya Manusia.....	4
1.4. Isu Strategis.....	5
1.4.1. Dukungan Anggaran.....	5
1.4.2. Permasalahan Utama.....	7
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	9
2.1 Rencana Strategis.....	9
2.1.1. Pernyataan Visi.....	9
2.1.2. Pernyataan Misi.....	10
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
2.1.4. Kebijakan dan Program Pengawasan.....	12
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	14
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.2. Realisasi Anggaran.....	32
BAB IV Penutup.....	33



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat I bertanggung jawab untuk menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan di unit-unit organisasi yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pengawasan ini dilakukan melalui kegiatan, antara lain audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dasar hukum yang mengatur tugas-tugas tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Saat ini, terjadi pergeseran paradigma dalam peran auditor. Dari yang sebelumnya menekankan pada audit kepatuhan (*compliance audit*) terhadap aturan, kini auditor lebih berperan sebagai konsultan yang membantu mengidentifikasi akar permasalahan dan dampak dari suatu penyimpangan. Rekomendasi yang diberikan auditor berfungsi untuk menghilangkan faktor penyebab masalah dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Dengan demikian, diharapkan setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pergeseran ini juga meningkatkan peran auditor dalam penjaminan kualitas (*quality assurance*) dengan mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya, sehingga memperkuat posisinya sebagai katalisator perubahan.

Melalui penjaminan kualitas, Inspektorat I berupaya memberikan keyakinan yang memadai kepada mitra kerja bahwa program dan kegiatan mereka akan berjalan efektif dan efisien. Keyakinan ini didukung oleh rekomendasi yang akurat dan implementatif, yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pengelola program di tingkat eselon I untuk memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan Kementerian Pertanian.

Sebagai lembaga publik, Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berkewajiban melaporkan pelaksanaan APBN sebagai wujud akuntabilitas. Akuntabilitas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,

merupakan prinsip penting dalam *good governance*. Prinsip ini mengharuskan setiap kegiatan dan hasilnya dalam penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Inspektorat I atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekaligus memenuhi Kontrak Kinerja sebagai komitmen pengelolaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di setiap unit eselon II. Laporan ini berfungsi sebagai alat pengendalian dan pendorong peningkatan kinerja Inspektorat I, serta sebagai sarana untuk menerima masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban internal dan pemenuhan Kontrak Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja juga diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan hukumnya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian pasal 190 dan 191 menetapkan Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan menyelenggarakan fungsi.

- a. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat I;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat I;



- c. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian pasal 192 menetapkan Struktur Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Inspektorat I dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat I

STRUKTUR ORGANISASI



Sesuai dengan Gambar 1.1. di atas, dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur membawahi.

a. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan,



rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Inspektorat I.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Inspektorat I posisi per 31 Desember 2024 dapat disampaikan sebagai berikut.

a. Komposisi SDM Inspektorat I

Sebaran sumber daya pegawai pada unit kerja Inspektorat I dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Keragaan Sumber Daya Manusia Inspektorat I Per 27 Februari 2024

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1.	Pejabat Struktural:	
	a. Inspektur I	1
	b. Kasubag TU	1
	c. Fungsional Umum	5
	Jumlah	7
2.	Pejabat Fungsional Auditor:	
	a. Auditor Ahli Utama	2
	b. Auditor Ahli Madya	10
	c. Auditor Ahli Muda	10
	d. Auditor Ahli Pertama	10
	Jumlah	32
	Total	39

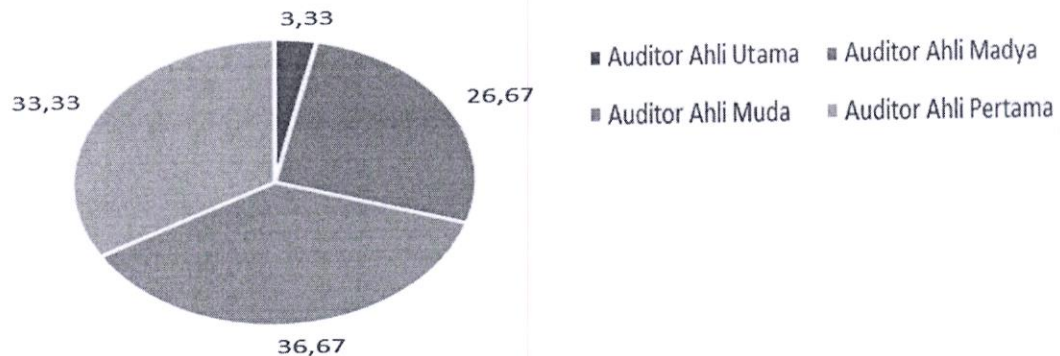
Sumber data: Bagian Kepegawaian Itjentan, Desember 2024

Terdapat perubahan komposisi sumber daya manusia dengan adanya 2 Auditor Utama yang memasuki masa purna bakti, 2 Auditor Madya yang menjadi Pejabat Pratama Madya pada Unit Kerja lain dan 2 Auditor Madya yang memasuki masa purna bakti. Sehingga total sumber daya manusia lingkup Inspektorat I per 31 Desember 2024 sebanyak 33 personil.



Gambar 1.2. Grafik Komposisi Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat I

Komposisi Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat I



Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Inspektorat I hingga akhir Desember 2024 menunjukkan jumlah Auditor Ahli Muda sebagai yang terbanyak. Diikuti oleh Auditor Ahli Pertama sebagai jumlah personel terbanyak kedua. Akibatnya, dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Pengembangan SDM Inspektorat I, dilaksanakan melalui program Penjenjangan Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), diklat teknis substansi pengawasan, dan kegiatan *workshop/seminar/PKS* di bidang pengawasan.

b. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S3	0
2.	S2	22
3.	S1	16
4.	D3	0
5.	SLTA	1
Jumlah		39

Sumber data: Bag. Kepegawaian Itjentan, Desember 2023

Klasifikasi berdasarkan jenjang pendidikan terdiri atas S2 sebanyak 22 orang, S1 sebanyak 16 orang dan SLTA sebanyak 1 orang.

1.4. Isu Strategis

1.4.1 Dukungan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan/program pengawasan Tahun Anggaran 2024 Inspektorat I didukung dengan anggaran senilai Rp15.882.836.000,00. Anggaran Inspektorat I Tahun Anggaran 2024 lebih rendah dibandingkan



Tahun Anggaran 2023 senilai Rp16.542.386.000,00. Anggaran dialokasikan untuk kegiatan pengawasan, maupun dalam rangka kegiatan dukungan teknis dan administrasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.3. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun Anggaran 2024

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ KOMPONEN/AKUN/URAIAN PENGELUARAN	PAGU (Rp,00)
1	4578.EBD.015	Layanan Audit Internal Inspektorat I	9.809.916.000
2	4578.EBD.U10	Laporan Hasil Audit Pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat I	3.668.580.000
3	4578.EBD.U11	Laporan Hasil Pengawasan SPIP pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat I	1.885.280.000
4	4578.EBD.U12	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Mitra Kerja Inspektorat I	134.310.000
5	4578.EBD.U13	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL pada Sakter Lingkup Mitra Kerja Inspektorat I	384.750.000
TOTAL			15.882.836.000

Dari Pagu Anggaran tersebut terdapat blokir AA senilai Rp7.522.768.000,00 dan penghematan anggaran perjalanan dinas pada bulan November 2024 senilai Rp45.465.000,00 tanpa adanya perubahan target *output*. Selain itu, terdapat penambahan anggaran Optimalisasi anggaran belanja pegawai operasional (001) pada Itjen Kementan sebesar Rp1.787.148.000,00 yang digunakan untuk Layanan Audit Internal Inspektorat I berupa pemantauan dan pengawasan pompanisasi peningkatan produksi padi TA 2024 pada 16 (enam belas) provinsi yang mendapatkan alokasi kegiatan mendukung PAT dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Alokasi anggaran Inspektorat I TA. 2024 setelah Blokir AA, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4. Alokasi Anggaran Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 Setelah Blokir AA dan Penghematan

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Tambahan Anggaran	Pagu Setelah Tambahan Anggaran	BLOKIR AA	Penghematan	Pagu Setelah Blokir dan Penghematan
1	Layanan Audit Internal Inspektorat I	8.022.768.000	1.787.148.000	9.809.916.000	7.022.768.000	36.455.000	2.750.693.000
051	Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh mitra Inspektorat I	998.778.000	-	998.778.000	723.800.000	-	274.978.000
052	Evaluasi program/kegiatan strategis pada satker lingkup mitra kerja Inspektorat I	978.288.000	-	978.288.000	860.680.000	-	117.608.000
053	Pengawasan lainnya lingkup Inspektorat I	4.472.525.000	1.787.148.000	6.259.673.000	4.357.818.000	17.550.000	1.884.305.000
054	Pendampingan workshop penyusunan LK Eselon I dalam rangka mendukung WTP	741.035.000	-	741.035.000	605.470.000	-	135.565.000
055	Pengawasan dan pendampingan dalam rangka kedaulatan pangan lingkup mitra kerja Inspektorat I	832.142.000	-	832.142.000	475.000.000	18.905.000	338.237.000
2	Laporan hasil audit pada satker lingkup mitra kerja Inspektorat I	3.668.580.000	-	3.668.580.000	500.000.000	-	3.168.580.000
3	Laporan hasil pengawasan SPIP lingkup mitra kerja Inspektorat I	1.855.280.000	-	1.855.280.000	-	-	1.855.280.000
4	Laporan hasil evaluasi SAKIP Eselon I lingkup mitra kerja Inspektorat I	134.310.000	-	134.310.000	-	5.100.000	129.210.000
5	Laporan hasil reviu LK dan Reviu RKAKL pada satker lingkup mitra kerja Inspektorat I	384.750.000	-	384.750.000	-	3.910.000	380.840.000
TOTAL		14.065.688.000	1.787.148.000	15.852.836.000	7.522.768.000	45.465.000	8.284.603.000

Sumber: DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2024



1.4.2. Permasalahan Utama

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasannya, Inspektorat I tidak hanya berkoordinasi dengan Eselon I Mitra, tetapi juga dengan berbagai pihak eksternal dan internal, antara lain Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) kementerian dan lembaga lain, Inspektorat Daerah, dan BPKP, sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Inspektorat I juga menjalin koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai aparat pengawas eksternal pemerintah. Koordinasi dengan BPK ini bertujuan untuk mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui pendekatan preventif, yaitu melalui kegiatan pengawalan dan tindak lanjut atas temuan BPK.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 adalah sebagai berikut.

- a. Audit Kinerja dan Audit Ketaatan Pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Pengawalan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d. Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Laporan Keuangan Kementerian;
- e. Pemantauan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan, baik rekomendasi hasil pengawasan internal maupun hasil pengawasan eksternal (BPK-RI); dan
- f. Layanan Audit Internal.

Permasalahan yang dihadapi Inspektorat I dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut, yaitu:

- a. Jumlah sumber daya manusia (SDM) auditor dan alokasi anggaran yang terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya objek yang harus diawasi menyebabkan terbatasnya jumlah satuan kerja (satker) yang dapat diaudit.



- b. Komposisi tingkatan jabatan auditor di Inspektorat I kurang ideal. Jumlah Auditor Ahli Muda, yaitu 11 orang (36,67%), lebih banyak dibandingkan Auditor Madya yang hanya 8 orang (26,67%). Sementara itu, jumlah Auditor Ahli Pertama adalah 10 orang (33,33%) dari total 30 auditor. Ketidakseimbangan ini berdampak pada penugasan tim, di mana Auditor Ahli Madya dan Ahli Muda terkadang harus menjalankan tugas yang seharusnya diemban oleh tingkatan di bawahnya.
- c. Penerapan pengawasan berbasis Teknologi Informasi (TI) belum optimal di kalangan auditor. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sistem aplikasi yang belum sepenuhnya sempurna, kurangnya profesionalisme auditor dalam pemanfaatan TI, serta baru terdapat 2 dari 30 auditor (6,67%) yang memiliki sertifikasi di bidang Audit TI.
- d. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi mengalami kendala terkait penjadwalan. Penetapan waktu pelaksanaan diklat sepenuhnya berada di tangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai institusi pembina APIP.



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2

2.1. Rencana Strategis

Inspektorat I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman dan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024 Revisi III yang di dalamnya memuat tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Jenderal. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah ***"Menjadi Mitra Miyatani dalam mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern"***.

2.1.1 Pernyataan Visi

Kondisi yang ingin dicapai oleh Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama lima tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah ***"Menjadi Mitra Miyatani Eselon I dalam mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern"***.

Penjabaran dan definisi visium Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut. ***Mitra***; Teman atau sahabat, hal ini dimaksudkan bahwa Inspektorat Jenderal dianggap sebagai teman dalam kedudukan yang setara bagi pelaksana program pembangunan pertanian. Visi ini diturunkan ke dalam paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal, dimana Inspektorat Jenderal berperan sebagai *Quality Assurance* dan *Consultative Partner*.

Miyatani; Berasal dari bahasa sansekerta yang berarti dipercaya, yang dimaksud bahwa dengan kapabilitas SDM Inspektorat Jenderal yang meningkat serta pemanfaatan teknologi informasi, maka Itjen sebagai APIP dianggap andal, profesional dan berintegritas.

Eselon I; Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Pengelola Program Pembangunan Pertanian; Seluruh pejabat dan penanggung jawab program dan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian;



Maju; Menjadikan pertanian yang terus bergerak ke depan, memiliki aksi dan dinamika perubahan terus menerus menuju sesuatu yang lebih baik.

Mandiri; Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Modern; Terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman era revolusi industri 4.0, pertanian harus sudah memanfaatkan teknologi mutakhir.

2.1.2 Pernyataan Misi

Dalam menerapkan misi Kementerian Pertanian, Inspektorat I mendukung pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui arah pengawasan Inspektorat Jenderal yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Mewujudkan penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; serta
- c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Renstra Inspektorat Jenderal Revisi III merupakan renstra terakhir, diterbitkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian nomor 616/Kpts/OT.050/G/03/2024 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2020-2024, tanggal 19 Maret 2024. Renstra tersebut telah dilengkapi dengan Manual Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Berdasarkan renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, target kinerja Inspektorat I dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.1. Target Kinerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 Revisi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PELAKSANAAN PENGAWASAN PADA SATKER LINGKUP SETJEN, DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA DAN BPPSDMP									
	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1.a)	Rata-rata nilai PMPRB Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	Nilai	32,77	33,27	33,77	34,27	-
		1.b)	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup mitra Inspektorat I	Nilai	-	-	-	-	74,83
		2)	Rata-rata level maturitas penyelenggaraan SPIP eselon I mitra Inspektorat I	Level	3	3	3	3	-
		3)	Rata – rata nilai AKIP unit eselon I mitra Inspektorat I	Nilai	80	81	82	83	-
		4)	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terkait pada Eselon I yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	%	75	75	80	85	
		5)	Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I	%	75	80	85	90	90
		6)	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	%	75	80	85	90	90
		7)	Persentase rekomendasi evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat I	%	75	80	85	90	90
		8)	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	%	75	80	85	90	90
		9)	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat I terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat I	Skala Likert (1-5)	-	3,10	3,15	3,20	3,25



2.1.4 Kebijakan dan Program Pengawasan

a. Kebijakan Pengawasan Intern

Kebijakan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024 serta peraturan lainnya untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggung jawab, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang bersih dan profesional.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat I, selaras dengan kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dicapai secara efektif, efisien dan bersih dari KKN. Kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 diarahkan pada: (a) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan pertanian; (b) Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan (c) Peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal.



Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia diarahkan pada pencapaian *good governance*, secara partisipatif, transparansi, dan akuntabel. Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan secara amanah, bersih dan bertanggung jawab. Selaku aparatur pengawasan intern di Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal akan menciptakan pengawasan intern kemitraan pro-aktif yang mengedepankan profesionalitas dilandasi kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

b. Program Kegiatan

Kebijakan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat I selama tahun 2024 pada satker Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari:

- 1) Audit kinerja satker daerah;
- 2) Audit Ketaatan satker kantor pusat dan daerah;
- 3) Pengawalan SPIP;
- 4) Evaluasi terhadap AKIP unit kerja Eselon I;
- 5) Reviu Laporan Keuangan;
- 6) Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L);
- 7) Tindak lanjut hasil pengawasaan eksternal;
- 8) Tindak lanjut hasil pengawasaan internal;
- 9) Menghadiri undangan pengawasan;
- 10) Reviu Aplikasi BAST 526;
- 11) Reviu persiapan pengadaan barang/jasa (Harga Perkiraan Sendiri (HPS));
- 12) Pendampingan penyusunan/evaluasi LAKIN & pelaksanaan RB;
- 13) Fasilitasi pelaksanaan pengawasan;
- 14) Pendampingan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I dalam rangka mendukung WTP;
- 15) Pengawasan dan pendampingan dalam rangka Perluasan Arel Tanam (PAT) Inspektorat I.

c. Langkah Operasional

Langkah-langkah operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap program pembangunan pertanian untuk



mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan metodologi audit berbasis risiko sebagai berikut.

- 1) Identifikasi risiko unit kerja dan kegiatan terkait program peningkatan kedaulatan pangan;
- 2) Fasilitasi unit kerja dalam manajemen risiko melalui identifikasi dan analisis risiko;
- 3) Reviu register risiko unit kerja menjadi audit *universe* Inspektorat Jenderal;
- 4) Analisis target-target kinerja dan pemetaan (*mapping*) dalam periode reguler;
- 5) Evaluasi berbasis penyimpangan (*gap*) signifikan dan audit berbasis *sampling*.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Sebagai implementasi dari penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN), Inspektorat I telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Hal tersebut berfungsi sebagai acuan/tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan Inspektorat Tahun 2024 yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengembalian tugas dan penanggungjawab kinerja dalam hal ini Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja yaitu Inspektur Jenderal dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Seperti telah dijelaskan pada point 2.1.3 bahwa Renstra Inspektorat Jenderal Revisi III merupakan renstra terakhir, diterbitkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian nomor 616/Kpts/OT.050/G/03/2024 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2020-2024, tanggal 19 Maret 2024. Renstra tersebut telah dilengkapi dengan Manual Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Namun, Manual IKU Itjen Kementan dilakukan revisi kembali pada tanggal 30 September 2024 dan diikuti dengan penyesuaian Perjanjian Kinerja Inspektur I.



Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran dari Kegiatan Pengawasan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dengan total anggaran senilai Rp15.852.836.000,00. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2024 yang berisi sasaran, indikator kinerja sasaran, beserta target yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Prasarana dan Sarana Pertanian	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab mitra Inspektorat I	74,83%
		2	Persentase rekomendasi Audit yang ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I	90.00%
		3	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	90.00%
		4	Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	90.00%
		5	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	90.00%
		6	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat I terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat I	3.25 skala Likert

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektur I Kementerian Pertanian

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa *output* dan atau *outcome*) yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada satu tahun tertentu.

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Layanan Audit Internal Inspektorat I	9.809.916.000
051	Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti oleh mitra Inspektorat I	998.778.000
052	Evaluasi Program/Kegiatan Strategis pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat I	978.288.000
053	Pengawasan lainnya lingkup Inspektorat I	6.259.673.000



No	Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
054	Pendampingan Workshop Penyusunan LK Eselon I dalam rangka mendukung WTP	741.035.000
055	Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka Kedaulatan Pangan Lingkup Mitra Kerja Inspektorat I	832.142.000
2	Laporan Hasil Audit Pada Satker Lingkup Mitra Kerja inspektorat I	3.668.580.000
3	Laporan Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Mitra Kerja Inspektorat I	1.855.280.000
4	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Mitra Kerja Inspektorat I	134.310.000
5	Laporan Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL Pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat I	384.750.000
Jumlah		15.852.836.000

Secara umum, pencapaian indikator kinerja tersebut di atas didukung dengan target kegiatan yang akan dilaksanakan pada TA. 2024 dengan dukungan anggaran dari DIPA Inspektorat Jenderal TA. 2024. Rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Auditor lingkup Inspektorat I tersebut sebagai berikut.

Tabel 2.4. Target Output Kegiatan Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024

No	Kegiatan	Target	Satuan
1.	Laporan Hasil Audit pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	50	Laporan
2.	Laporan Hasil Pengawasan SPIP lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	24	Laporan
3.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta SAKIP Kementerian	2	Laporan
4.	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta Laporan Keuangan Kementerian	12	Laporan
5.	Laporan Layanan Audit Internal Inspektorat I	12	Laporan
Jumlah		100	Laporan

Pada tahun 2024, terdapat blokir AA senilai Rp7.522.768.000,00 dan penghematan anggaran perjalanan dinas pada bulan November 2024 senilai Rp45.465.000,00 tanpa adanya perubahan target *output*.

Selain itu, pada bulan September 2024, terdapat penambahan anggaran Optimalisasi anggaran belanja pegawai operasional (001) pada Itjen Kementan sebesar Rp1.787.148.000,00 bersumber dari realokasi internal RO 1760.EBA.994 Layanan Perkantoran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan eksternal (Unit Eselon I Setjen Kementan) sebesar Rp787.148.000,00, yang akan digunakan untuk RO 4578.EBD.015 Layanan Audit Internal Inspektorat I berupa pemantauan dan



pengawasan pompanisasi peningkatan produksi padi TA 2024 pada 16 (enam belas) provinsi yang mendapatkan bantuan pompanisasi melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan (pemantauan dan pengawasan) terhadap tambahan anggaran pompanisasi peningkatan produksi padi TA 2024.

Penambahan anggaran tersebut masuk kedalam Layanan Audit Internal, sub komponen Pengawasan lainnya lingkup Inspektorat I, berupa kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pompanisasi Peningkatan Produksi Padi TA 2024.

Alokasi anggaran Inspektorat I TA. 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 Setelah Blokir AA dan Penghematan

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Tambahan Anggaran	Pagu Setelah Tambahan Anggaran	BLOKIR AA	Penghematan	Pagu Setelah Blokir dan Penghematan
1	Layanan Audit Internal Inspektorat I	8.022.768.000	1.787.148.000	9.809.916.000	7.022.768.000	36.455.000	2.750.693.000
051	Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh mitra Inspektorat I	998.778.000	-	998.778.000	723.800.000	-	274.978.000
052	Evaluasi program/kegiatan strategis pada satker lingkup mitra kerja Inspektorat I	978.288.000	-	978.288.000	860.680.000	-	117.608.000
053	Pengawasan lainnya lingkup Inspektorat I	4.472.525.000	1.787.148.000	6.259.673.000	4.357.818.000	17.550.000	1.884.305.000
054	Pendampingan workshop penyusunan LK Eselon I dalam rangka mendukung WTP	741.035.000	-	741.035.000	605.470.000	-	135.565.000
055	Pengawasan dan pendampingan dalam rangka kedaulatan pangan lingkup mitra kerja Inspektorat I	832.142.000	-	832.142.000	475.000.000	18.905.000	338.237.000
2	Laporan hasil audit pada satker lingkup mitra kerja Inspektorat I	3.668.580.000	-	3.668.580.000	500.000.000	-	3.168.580.000
3	Laporan hasil pengawasan SPIP lingkup mitra kerja Inspektorat I	1.855.280.000	-	1.855.280.000	-	-	1.855.280.000
4	Laporan hasil evaluasi SAKIP Eselon I lingkup mitra kerja Inspektorat I	134.310.000	-	134.310.000	-	5.100.000	129.210.000
5	Laporan hasil reviu LK dan Reviu RKAKL pada satker lingkup mitra kerja Inspektorat I	384.750.000	-	384.750.000	-	3.910.000	380.840.000
TOTAL		14.065.688.000	1.787.148.000	15.852.836.000	7.522.768.000	45.465.000	8.284.603.000

Sumber: DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2024



AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan analisis akuntabilitas keuangan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai capaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam laporan ini, Inspektorat I dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat I melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat I

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Inspektorat I Tahun 2024 per 31 Desember 2024

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1-1	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup mitra Inspektorat I	74,83	73,17	97,77
1-2	Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I	90,00	91,94	102,16
1-3	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	90,00	99,30	110,33
1-4	Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	90,00	100,00	111,11
1-5	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	90,00	97,46	108,29
1-6	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat I terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat I	3,25	3,27	100,62

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran Kinerja “Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi” yang meliputi 6 (Enam) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) dengan uraian sebagai berikut:

a. Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab mitra Inspektorat I

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, evaluasi reformasi birokrasi dilaksanakan bertujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan 13 rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi reformasi birokrasi terdiri dari evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh evaluator internal pada tahap perencanaan



reformasi birokrasi dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik. RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi. RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik. Dimensi RB General terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi. Cara mengukur “Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab mitra Inspektorat I” didapat dengan merata-rata nilai dari Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Eselon I mitra kerja Inspektorat I (Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal PSP). Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Mitra Inspektorat I yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 98,01% dan Direktorat Jenderal PSP sebesar 97,54% dengan rata-rata sebesar 97,88% dengan kategori **Sangat Memuaskan**. Hasil pendampingan PMPRB Tahun 2024 pada unit eselon I mitra Inspektorat I dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Unit Eselon I Mitra

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Mitra Inspektorat I	74,83	73,34	98,01
2	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Mitra Inspektorat I	74,83	72,99	97,54
	Rata-rata		74,83	73,17	97,77

Hasil penilaian PMPRB Tahun 2024 menggunakan penilaian yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung.



b. **Persentase rekomendasi Audit yang ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I**

Perhitungan indikator “Persentase rekomendasi Audit yang ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I” dengan cara membandingkan antara jumlah rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh unit eselon I pada tahun n dan n-1 dengan total rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat I pada tahun sebelumnya.

$$\left(\frac{\text{Rekomendasi hasil audit Inspektorat I yang ditindaklanjuti unit eselon I pada tahun n dan n-1}}{\text{Total rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat I pada tahun sebelumnya}} \right) \times 100\%$$

Perhitungan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi tahun sebelumnya (n-1) berdasarkan hasil validasi dan rekonsiliasi antara Inspektorat I dengan Eselon I dan Bagian DPLHP Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Indikator kinerja “Persentase rekomendasi Audit yang ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I”, tercapai sebesar 91,94% dari target 90% atau capaian kinerja sebesar 102,16% dengan kategori **Sangat Memuaskan** dapat dilihat pada tabel 3.6. sebagai berikut.

Tabel 3.3. Persentase rekomendasi Audit yang ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi		
		Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	%
Rasio rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I	90	581	534	91,94
a. Ditjen Hortikultura		423	376	88,88
b. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		158	158	100

Terdapat peningkatan sebesar 1,75% atas rekomendasi Audit yang ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 90,19% karena pengawasan dan upaya tindak lanjut dari satker sebagai mitra Inspektorat I sudah cukup maksimal. Adapun rincian perbandingan hasil tindak lanjut dengan tahun sebelumnya dikemukakan pada tabel 3.7 sebagai berikut.



Tabel 3.4. Perbandingan Persentase rekomendasi Audit yang ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan pada Eselon I Mitra Inspektorat I

Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
Persentase Rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I	90	90,19	90	91,94
a. Ditjen Hortikultura	90	86,86	90	88,88
b. Ditjen PSP	90	91,99	90	100

c. Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I

Perhitungan indikator “Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I” dengan cara membandingkan antara jumlah rekomendasi reviu LK dan RKA-KL yang ditindaklanjuti oleh unit eselon I dengan total rekomendasi hasil reviu LK dan RKA-K/L audit yang diberikan Inspektorat I pada tahun sebelumnya.

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi Reviu LK dan RKA – K/L yang ditindaklanjuti sampai t berjalan}}{\text{Total rekomendasi Reviu LK dan Reviu RKA – KL pada t sebelumnya}} \right) \times 100\%$$

Indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I yang ditindaklanjuti Unit Eselon I Mitra Kerja Inspektorat I” tercapai sebesar 99,26% dari target 90% atau capaian kinerja sebesar 110,29% dengan kategori **Sangat Memuaskan** dapat dilihat pada tabel 3.8. berikut.

Tabel 3.5. Persentase Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L yang Ditindaklanjuti Mitra Kerja Inspektorat I

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi		
		Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	%
Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I	90	722	717	99,30
a. Ditjen Hortikultura		539	534	99,07
b. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		183	183	100,00

Terdapat penurunan persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I



sebesar 0,70 dari tahun 2023 sebesar 100 menjadi 99,30 karena terdapat beberapa hasil tindak lanjut rekomendasi yang masih dalam proses verifikasi. Adapun rincian perbandingan hasil tindak lanjut dengan tahun sebelumnya dikemukakan pada tabel 3.9 sebagai berikut.

Tabel 3.6. Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L yang Ditindaklanjuti pada Eselon I Mitra Inspektorat I

Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
Persentase Rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I	90	100	90	99,30
a. Ditjen Hortikultura	90	100	90	99,07
b. Ditjen PSP	90	100	90	100

d. Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I

Perhitungan indikator “Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I” berdasarkan persentase jumlah rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Inspektorat I yang ditindaklanjuti unit Eselon I sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I pada tahun sebelumnya dengan rumus sebagai berikut.

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti sampai t berjalan}}{\text{Total rekomendasi Evaluasi SAKIP pada tahun sebelumnya}} \right) \times 100\%$$

Indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I Mitra Kerja Inspektorat I” tercapai sebesar 100% dari target 90% atau capaian kinerja sebesar 111,11% dengan kategori **Sangat Memuaskan** dapat dilihat pada Tabel 3.10. berikut.

Tabel 3.7. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP yang Ditindaklanjuti Mitra Kerja Inspektorat I

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi		
		Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	%
Persentase Rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit Eselon I Mitra Kerja Inspektorat I	90	6	6	100
a. Ditjen Hortikultura		3	3	100
b. Ditjen PSP		3	3	100



Tidak terdapat penurunan atas Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I sebesar dari tahun 2023 sebesar 100 sedangkan pada tahun 2024 tetap sebesar 100 yang merupakan keberhasilan Inspektorat dalam melakukan percepatan tindaklanjut hasil Evaluasi SAKIP. Adapun rincian perbandingan hasil tindak lanjut dengan tahun sebelumnya dikemukakan pada tabel 3.11 sebagai berikut.

Tabel 3.8. Perbandingan Persentase Rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I

Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
Persentase Rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I	85	100	90	100
a. Ditjen Hortikultura	85	100	90	100
b. Ditjen PSP	85	100	90	100

Berdasarkan tabel di atas disampaikan bahwa tidak terdapat penurunan capaian kinerja TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat I aktif dalam mendorong mitra Eselon I untuk meningkatkan kinerjanya melalui pendampingan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Eselon I mitra Inspektorat I.

e. Persentase Rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I

Perhitungan indikator “Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I” berdasarkan persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan SPIP Inspektorat I yang ditindaklanjuti unit Eselon I sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I pada tahun sebelumnya dengan rumus sebagai berikut.

$$\left(\frac{\text{Rekomendasi Pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti Unit Eselon I sampai dengan tahun berjalan}}{\text{Total rekomendasi pengawasan yang diberikan Inspektorat I pada tahun sebelumnya}} \right) \times 100\%$$

Indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Pengawasan SPIP yang Ditindaklanjuti Unit Eselon I Mitra Kerja Inspektorat I” tercapai sebesar 97,46% dari target 90% atau capaian kinerja sebesar 105,46% dengan kategori



“**Sangat Memuaskan**”. Adapun jumlah rekomendasi dan tindaklanjut unit eselon I mitra kerja Inspektorat I terlihat pada tabel 3.12. berikut.

Tabel 3.9. Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi		
		Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	%
Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I	90	140	137	97,46
a. Ditjen Hortikultura		59	56	94,92
b. Ditjen PSP		81	81	100,00

Terdapat penurunan Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I sebesar 2,54% dari tahun 2023 sebesar 100% menjadi 97,46% dimana terdapat beberapa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh satker karena sudah inaktif. Adapun rincian perbandingan hasil tindak lanjut dengan tahun sebelumnya dikemukakan pada tabel 3.13 sebagai berikut.

Tabel 3.10. Perbandingan Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I

Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
Persentase Rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat I	90	100	90	97,46
a. Ditjen Hortikultura	90	100	90	94,92
b. Ditjen PSP	90	100	90	100

f. Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat I terhadap Layanan Ketatausahaan TU Inspektorat I

Tingkat Kepuasan Pegawai lingkup Inspektorat I terhadap Layanan Internal (Ketatausahaan dan Administrasi) diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Pegawai lingkup Inspektorat I dalam memperoleh pelayanan Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat I.

Indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat I Terhadap Layanan Ketatausahaan TU Inspektorat I” dengan target sebesar 3,25 tercapai dengan nilai 3,27 atau dengan capaian kinerja sebesar 100,61% dengan kategori **Sangat Memuaskan**.



Nilai Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Internal (Ketatausahaan dan Administrasi) merupakan nilai rata-rata tingkat kepuasan Pegawai lingkup Inspektorat I terhadap layanan Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat I.

2. Capaian Kinerja Output Kegiatan Inspektorat I Tahun 2024

Inspektorat I mendapat alokasi anggaran Tahun 2024 senilai Rp8.284.603.000,00 dengan realisasi senilai Rp8.276.263.089,00 atau 99,84% untuk mendukung kegiatan pengawasan terhadap eselon I mitra Inspektorat I. Adapun capaian kinerja kegiatan Inspektorat I Tahun 2024 sebagai berikut.

a. Audit Kinerja

Kegiatan Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Inspektorat I selama Tahun 2024 pada mitra Inspektorat I (Ditjen Hortikultura dan Ditjen PSP) dengan capaian output laporan sebanyak 54 laporan dari target 50 laporan (108%) dengan realisasi anggaran senilai Rp3.168.274.944,00 atau 99,99% dari alokasi anggaran senilai Rp3.168.580.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11. Rekapitulasi Capaian Kinerja Audit Kinerja Inspektorat I TA 2024

No.	Nomor ST	Judul LHP
1	B.0059/PW.130/G.2/02/2024	Melaksanakan Audit Kinerja atas Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY (04- DK) TA 2023
2	B.0067/PW.130/G.2/02/2024	Melaksanakan Audit Ketaatan Pada Satker Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara (04 - TP) TA 2023 dan 2024
3	B.0071/PW.130/G.2/02/2024	Melaksanakan Audit Ketaatan Pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan (04 - TP) TA 2023 dan 2024
4	B.0070/PW.130/G.2/02/2024	Melaksanakan Audit Ketaatan Pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan (04 - DK) TA 2023 dan 2024
5	B.0076/PW.130/G.2/02/2024	Melaksanakan Audit Ketaatan pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (04-TP) TA. 2023 - 2024
6	B.0075/PW.130/G.2/02/2024	Melaksanakan Audit Ketaatan pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (04-DK) TA. 2023 - 2024
7	B.0066/PW.130/G.2/02/2024	Melaksanakan Audit Ketaatan Pada Satker Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara (04 - DK) TA 2023 dan 2024
8	B.0060/PW.130/G.2/02/2024	Melaksanakan Audit Kinerja Atas Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (04- TP) TA 2023
9	B.0068/PW.130/G.2/02/2024	Melaksanakan Audit Ketaatan Pada Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara (08 - DK) TA 2023 dan 2024
10	B.0072/PW.130/G.2/02/2024	Melaksanakan Audit Ketaatan Pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara (04 - DK) TA 2023 dan 2024
11	B.0073/PW.130/G.2/02/2024	Melaksanakan Audit Ketaatan Pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara (04 - TP) TA 2023 dan 2024
12	B.0069/PW.130/G.2/02/2024	Melaksanakan Audit Ketaatan Pada Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara (08 - TP) TA 2023 dan 2024
13	B.0190/PW.130/G.2/05/2024	Melaksanakan Audit Kinerja atas Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali (DK-08) TA 2023
14	B.0191/PW.130/G.2/05/2024	Melaksanakan Audit Kinerja atas Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali (TP-08) TA 2023
15	B.0189/PW.130/G.2/05/2024	Melaksanakan Audit Kinerja atas Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (TP-08) Provinsi Jawa Timur TA 2023
16	B.0180/PW.130/G.2/05/2024	Melaksanakan Audit Kinerja atas Program dan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DK-04) Provinsi Sumatera Selatan TA 2023
17	B.0183/PW.130/G.2/05/2024	Melaksanakan Audit Kinerja atas Program dan Nilai Tambah dan Daya Saing Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (TP-04) Provinsi Sumatera Selatan TA 2023



No.	Nomor ST	Judul LHP
18	B.0182/PW.130/G.2/05/2024	Melaksanakan Audit Kinerja atas Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (TP-04) TA 2023
19	B.0192/PW.130/G.2/05/2024	Melaksanakan Audit Kinerja atas Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (DK-04) TA 2023
20	B.0179/PW.130/G.2/05/2024	Melaksanakan Audit Kinerja atas Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan (04-TP) Provinsi Aceh TA 2023
21	B.0187/PW.130/G.2/05/2024	Melaksanakan Audit Kinerja atas Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (DK-04) TA 2023
22	B.0181/PW.130/G.2/05/2024	Melaksanakan Audit Kinerja atas Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (TP-04) TA 2023
23	B.0178/PW.130/G.2/05/2024	Melaksanakan Audit Kinerja atas Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan dan Berkualitas pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan (04-DK) Provinsi Aceh TA 2023
24	B.0188/PW.130/G.2/05/2024	Melaksanakan Audit Kinerja atas Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan program dukungan manajemen pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DK-08) Provinsi Jawa Timur TA 2023
25	B.0185/PW.130/G.2/05/2024	Melaksanakan Audit Kinerja atas Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DK-04) Provinsi Jawa Timur TA 2023
26	B.0186/PW.130/G.2/05/2024	Melaksanakan Audit Kinerja atas Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (TP-04) Provinsi Jawa Timur TA 2023
27	B.0220/RC.200/G.2/06/2024	Melaksanakan Audit TIK Aplikasi RIPH pada Satker Direktorat Jenderal Hortikultura di Bogor
28	B.0263/PW.130/G.2/07/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Dukungan Manajemen Pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (08-TP) Provinsi Bangka Belitung TA. 2023
29	B.0264/PW.130/G.2/07/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (08-TP) Provinsi Bangka Belitung TA. 2024
30	B.0262/PW.130/G.2/07/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (08-TP) Provinsi Bangka Belitung TA. 2023
31	B.0269/PW.130/G.2/07/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Dukungan Manajemen Pada Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (08-TP) Provinsi Kalimantan Barat TA. 2023
32	B.0270/PW.130/G.2/07/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Pada Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (08-TP) Provinsi Kalimantan Barat TA. 2024
33	B.0268/PW.130/G.2/07/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pada Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (08-TP) Provinsi Kalimantan Barat TA. 2023
34	B.0266/PW.130/G.2/07/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Dukungan Manajemen Pada Satker Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (08-TP) Provinsi Riau TA. 2023
35	B.0265/PW.130/G.2/07/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Ketersediaan Akses Pada Satker Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (08-TP) Provinsi Riau TA. 2023
36	B.0267/PW.130/G.2/07/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Pada Satker Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (08) Provinsi Riau TA. 2024
37	B.0289/PW.130/G.2/08/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pada Satker Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (08-TP) Provinsi Sumatera Selatan TA. 2023
38	B.0290/PW.130/G.2/08/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Dukungan Manajemen Pada Satker Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (08-TP) Provinsi Sumatera Selatan TA. 2023
39	B.0295/PW.130/G.2/08/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (08-TP) Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2024
40	B.0271/PW.130/G.2/07/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (08-TP) Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2023
41	B.0272/PW.130/G.2/07/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Dukungan Manajemen Pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (08-TP) Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2023
42	B.0273/PW.130/G.2/07/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (08-TP) Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2024 Melakukan Audit Kinerja Pr
43	B.0286/PW.130/G.2/08/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pada Satker Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (08-TP) Provinsi Lampung TA. 2023
44	B.0287/PW.130/G.2/08/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Dukungan Manajemen Pada Satker Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (08-TP) Provinsi Lampung TA. 2023
45	B.0288/PW.130/G.2/08/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pada Satker Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (08-TP) Provinsi Lampung TA. 2024
46	B.0293/PW.130/G.2/08/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (08-TP) Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2023



No.	Nomor ST	Judul LHP
47	B.0291/PW.130/G.2/08/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pada Satker Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (08-TP) Provinsi Sumatera Selatan TA. 2024
48	B.0432/PW.130/G.2/10/2024	Melaksanakan Audit Ketaatan pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan TA 2024
49	B.0434/PW.130/G.2/10/2024	Melaksanakan Audit Ketaatan pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Satker Dinas Pertanian Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (08-TP) TA 2024
50	B.0431/PW.130/G.2/10/2024	Melaksanakan Audit Ketaatan pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (08-TP) TA 2024
51	B.0430/PW.130/G.2/10/2024	Melaksanakan Audit Ketaatan pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke TA 2024
52	B.0442/PW.130/G.2/10/2024	Melaksanakan Audit Ketaatan pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pada Satker Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung TA 2024
53	B.0346/PW.130/G.2/09/2024	Melakukan Audit Ketaatan (Belanja Non 526) pada Satker Ditjen Hortikultura TA 2022 - 2024 (Lanjutan)
54	B.0294/PW.130/G.2/08/2024	Melakukan Audit Kinerja Program Dukungan Manajemen Pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (08-TP) Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2023

b. Pendampingan/Pengawasan SPIP

Kegiatan pendampingan/pengawasan SPI dilakukan terhadap kegiatan utama yang memiliki risiko tinggi. Berdasarkan hasil analisis risiko, Inspektorat I melakukan pengawasan dengan output sebanyak 28 laporan (116,67%) dari target output sebanyak 24 laporan dengan capaian realiasi anggaran senilai Rp1.854.748.876,00 atau 99,97% dari alokasi anggaran senilai Rp1.855.280.000,00 dengan kegiatan yang dikawal, yaitu:

Tabel 3.12. Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendampingan/Pengawasan SPIP Inspektorat I TA 2024

No	Surat Tugas	Uraian
1	B-0034/PW.180/G.2/02/2024	Melaksanakan Pengawasan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) TA 2024 Pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
2	B-0037/PW.180/G.2/02/2024	Melaksanakan Pengawasan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) TA 2024 Pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
3	B-0036/PW.180/G.2/02/2024	Melaksanakan Pengawasan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) TA 2024 Pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Kalimantan Tengah
4	B-0035/PW.180/G.2/02/2024	Melaksanakan Pengawasan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) TA 2024 Pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
5	B-0033/PW.180/G.2/02/2024	Melaksanakan Pengawasan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) TA 2024 Pada Satker Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
6	B.0105/PW.180/G.2/03/2024	Melaksanakan Pengawasan SPI Pada Program Kegiatan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura di Bogor
7	B.0101/PW.180/G.2/03/2024	Melaksanakan Pengawasan SPI Pada Program Kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura Ditjen Hortikultura di Bogor
8	B.0104/PW.180/G.2/03/2024	Melaksanakan Pengawasan SPI Pada Program Kegiatan Direktorat Perbenihan Hortikultura Ditjen Hortikultura di Bogor
9	B.0110/PW.180/G.2/03/2024	Melaksanakan Pengawasan SPIP SID Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) TA 2024 Pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan
10	B.0097/PW.180/G.2/03/2024	Melaksanakan Pengawasan SPI Pada Program Kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Bandung
11	B.0094/PW.180/G.2/03/2024	Melaksanakan Pengawasan SPI Pada Program Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pesticida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Bandung



No	Surat Tugas	Uraian
12	B.0103/RC.200/G.2/03/2024	Melaksanakan Pengawasan SPI Pada Program Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Ditjen Hortikultura di Bogor
13	B.0102/PW.180/G.2/03/2024	Melaksanakan Pengawasan SPI Pada Program Kegiatan Direktorat Buah dan Florikultura Ditjen Hortikultura di Bogor
14	B.0109/PW.180/G.2/03/2024	Melaksanakan Pengawasan SPIP SID Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) TA 2024 Pada Satker Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
15	B.0099/PW.180/G.2/03/2024	Melaksanakan Pengawasan SPI Pada Program Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Bandung
16	B.0141/PW.180/G.2/04/2024	Melaksanakan Pengawasan Percepatan Perluasan Areal Tanam (PAT) Provinsi Banten Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2024
17	B.0096/PW.180/G.2/03/2024	Melaksanakan Pengawasan SPI Pada Program Kegiatan Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Bandung
18	B.0128/PW.180/G.2/04/2024	Melaksanakan Pengawasan Percepatan Perluasan Areal Tanam (PAT) lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Provinsi Jawa Barat
19	B.0112/PW.180/G.2/03/2024	Melaksanakan Pengawasan SPIP SID Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) TA 2024 Pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
20	B.0142/PW.180/G.2/04/2024	Melaksanakan Pengawasan Percepatan Perluasan Areal Tanam (PAT) Provinsi NTT TA 2024
21	B.0149/PW.180/G.2/04/2024	Melaksanakan Pengawalam Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) pada Satker Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara TA 2024
22	B.0143/PW.180/G.2/04/2024	Melaksanakan Pengawasan Percepatan Perluasan Areal Tanam (PAT) Provinsi D.I Jogjakarta lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2024
23	B.0154/PW.180/G.2/04/2024	Melaksanakan Pengawalam Kegiatan Pompanisasi Mendukung Perluasan Areal Tanam (PAT) Untuk Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) Pada Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat TA 2024
24	B.0148/PW.180/G.2/04/2024	Melaksanakan Pengawalam Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh TA 2024
25	B.0155/PW.180/G.2/04/2024	Melaksanakan Pengawalam Kegiatan Pompanisasi Mendukung Perluasan Areal Tanam (PAT) Untuk Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) Pada Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan TA 2024
26	B.0157/PW.180/G.2/04/2024	Melaksanakan Pengawalam Kegiatan Pompanisasi Mendukung Perluasan Areal Tanam (PAT) Untuk Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) Pada Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan TA 2024
27	B.0111/PW.180/G.2/03/2024	Melaksanakan Pengawasan SPIP SID Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) TA 2024 Pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
28	B.0152/PW.180/G.2/04/2024	Melaksanakan Pengawalam Kegiatan Pompanisasi Mendukung Perluasan Areal Tanam (PAT) untuk Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) Pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2024

c. Evaluasi SAKIP

Evaluasi SAKIP dilaksanakan pada Eselon I, yaitu Ditjen Hortikultura dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Capaian output jumlah laporan yang dihasilkan sebanyak 2 laporan atau 100% dari target sebanyak 2 laporan



dengan capaian realiasi anggaran senilai Rp128.775.396,00 atau 99,66% dari alokasi anggaran senilai Rp129.210.000,00 dengan rincian penugasan sebagai berikut:

Tabel 3.13. Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendampingan/Pengawasan SPIP Inspektorat I TA 2024

No.	Surat Tugas	Uraian
1	B.0119/PW.170/G.2/03/2024	Melaksanakan Evaluasi SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura di Bogor
2	B.0130/PW.170/G.2/04/2024	Melaksanakan Evaluasi SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PSP Bogor

d. Reviu Laporan Keuangan (LK) dan Reviu (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

Capaian output jumlah laporan yang dihasilkan dari kegiatan Reviu LK dan RKAK/L sebanyak 12 laporan atau 100% dari target sebanyak 12 laporan dengan realiasi anggaran senilai Rp380.249.250,00 atau 99,85% dari alokasi anggaran senilai Rp384.750.000,00. Reviu LK dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan opini WTP pada laporan keuangan oleh BPK sedangkan Reviu RKA-K/L dilakukan terhadap pagu anggaran 2025 dan revisi/*refocusing* anggaran 2024 pada masing-masing mitra Inspektorat I dengan rincian penugasan sebagai berikut:

Tabel 3.14. Rekapitulasi Capaian Kinerja Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAK/L Inspektorat I TA 2024

No	Surat Tugas	Uraian
1	B.014/PW.140/G.2/01/2024	Melaksanakan Reviu PIPK Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Bogor
2	B.013/PW.140/G.2/01/2024	Melaksanakan Reviu PIPK Direktorat Jenderal Hortikultura di Bogor
3	B.0041/PW.110/G.2/01/2024	Melaksanakan Reviu Atas sisa Pembayaran Kegiatan Pengadaan Saprodi Pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2023 di Bogor
4	B.0020/PW.140/G.2/01/2024	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Semester II TA 2023 lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura di Depok
5	B.0055/PW.110/G.2/02/2024	Melaksanakan Reviu atas UJK BPK - RI Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2022 di Bogor
6	B.0028/PW.140/G.2/01/2024	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan tingkat UAKPA/B lingkup Ditjen PSP Semester II TA 2023 lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura di Depok
7	B.0074/PW.110/G.2/02/2024	Reviu Usulan Perubahan Rayonisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2024 lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di DKI Jakarta
8	B.0132/PW.140/G.2/04/2024	Melaksanakan reviu buka blokir anggaran belanja Ditjen Hortikultura
9	B.0158/PW.110/G.2/04/2024	Melaksanakan Reviu Buka Blokir TA 2024 Direktorat Jenderal Hortikultura di Bogor
10	B.0165/PW.110/G.2/05/2024	Melaksanakan Reviu SBK lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025 di Jakarta
11	B.0206/PW.110/G.2/06/2024	Melaksanakan reviu usulan buka blokir pupuk organik subsidi TA 2024 Direktorat Pupuk dan Subsidi Ditjen PSP
12	B.0230/PW.110/G.2/07/2024	Melaksanakan Reviu Usulan Tambahan Anggaran Subsidi Pupuk pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta



e. Layanan Audit Internal

Capaian output jumlah laporan yang dihasilkan dari kegiatan Layanan Audit Internal sebanyak 12 laporan atau 100% dari target sebanyak 12 laporan dengan realisasi anggaran senilai Rp2.744.214.623,00 atau 99,76% dari alokasi anggaran senilai Rp2.750.693.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.15. Rekapitulasi Capaian Kinerja LAI Inspektorat I TA 2024

No	Surat Tugas	Uraian
1	B-0009/RC.200/G.2/01/2024	Undangan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultan Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project (HDDAP) di Depok
2	B-0039/RC.200/G.2/02/2024	Melakukan Konfirmasi Hasil Quality Control (QC) Telaah Sejawat di Tangerang Selatan
3	B-0053/PW.130/G.2/02/2024	Melaksanakan Penyusunan Key Performance Indikator (KPI) Audit Kinerja Program Pada Satker Direktorat Jenderal Hortikultura di Bogor
4	B.0126/RC.200/G.2/04/2024	Melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Perluasan Areal Tanam (PAT) Padi Melalui Kegiatan Pompanisasi di Provinsi Jawa Barat antara Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan KODIM lingkup Jawa Barat
5	B.0137/RC.200/G.2/04/2024	Melaksanakan Sosialisasi Penyusunan Kertas Kerja Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegritas Kementerian Pertanian Tahun 2024 di Bogor
6	B.0172/RC.200/G.2/05/2024	Melaksanakan Supervisi Kompilasi Hasil Pendampingan Kegiatan Pompanisasi dan Jaringan Perpipaan di 8 Provinsi Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Bogor
7	B.0236/RC.200/G.2/07/2024	Penyusunan pedoman kerja pemantauan kegiatan pompanisasi
8	B.0239/PW.180/G.2/07/2024	Melaksanakan Persiapan Evaluasi dan Koordinasi Kegiatan Pompanisasi Mendukung Penambahan Areal Tanam (PAT) di Provinsi Jawa Barat
9	B.0343/RC.200/G.2/09/2024	Melakukan Focus Group Discussion (FGD) Terkait Review Unit Cost dan Petunjuk Teknis Kegiatan Cetak Sawah Rakyat TA. 2025 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Bogor
10	B.0402/PW.110/G.2/09/2024	Melaksanakan Pembahasan Usulan Tindakanlanjut Rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal Lingkup Ditjen Hortikultura di Bogor
11	B.0513/RC.200/G.2/11/2024	Melaksanakan Pembahasan Pupuk Bersubsidi dengan Itjen Keuangan di Jakarta
12	B.0526/RC.200/G.2/12/2024	Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Hasil Pemantauan Irpom, Irigasi Perpipaan dan Pompanisasi di Diy

3.2. Realisasi Anggaran

Capaian kinerja keuangan Inspektorat I sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar 99.85% dari anggaran senilai Rp15.852.836.000,00 dengan rincian realisasi anggaran senilai Rp8.276.263.089,00 dan terdapat anggaran yang diblokir senilai Rp7.522.768.000,00. Analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK



214/2017 dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut.

Rumus:

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Keterangan : NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

** Catatan:*

Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh *range* nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat I Tahun 2024 per 31 Desember 2024

No	Uraian	Output			Anggaran	Realisasi	%	Biaya Per Output	Efisiensi	Nilai Efisiensi
		Target	Relisasi	%						
1	Audit	50	54	108,00	3.168.580.000	3.168.274.944	99,990%	58.671.758	0,07	68,54%
2	Pengawasan	24	28	116,67	1.855.280.000	1.854.748.876	99,971%	66.241.031	0,14	85,78%
3	Evaluasi/SAKIP	2	2	100,00	129.210.000	128.775.396	99,664%	64.387.698	0,00	50,84%
4	Reviu LK dan Reviu RKAK/L	12	12	100,00	380.840.000	380.249.250	99,845%	31.687.438	0,00	50,39%
5	Layanan Audit Internal	12	12	100,00	2.750.693.000	2.744.214.623	99,764%	228.684.552	0,00	50,59%
Jumlah					8.284.603.000	8.276.263.089	99,847%		0,04	61,23%

Persentase capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2024 adalah mencapai nilai **4%** dengan penghitungan koefisien nilai efisiensinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 NE &= 50\% + (4\%/20 \times 50) \\
 &= 0,5 + (0,01123/20 \times 50) \\
 &= 0,5 + (0,1123) \\
 &= \mathbf{0,6123 \text{ atau } 61,23\%}.
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran Inspektorat I Inspektorat Jenderal Tahun 2024 per 31 Desember 2024 adalah 61,23% atau termasuk kategori **Cukup Efisien**.



PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri (*self evaluation*), capaian kinerja keuangan Inspektorat I Tahun 2024 per 31 Desember 2024 senilai Rp8.276.263.089,00 atau 99,85% dari anggaran setelah blokir (penghematan) senilai Rp8.284.603.000,00 (pagu anggaran Rp15.852.836.000,00) dan capaian kinerja fisik sebesar 108 laporan atau 108,00% dari target sebesar 100 laporan, dengan koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran Inspektorat I Inspektorat Jenderal tahun 2024 per 31 Desember 2024 adalah 61,23%.

Capaian kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 per 31 Desember 2024 Inspektorat I yaitu:

1. Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Mitra Inspektorat I dari target 74,83% diperoleh nilai rata-rata sebesar 73,17% dengan capaian kinerja 97,77% (Sangat Memuaskan).
2. Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I terealisasi sebesar 91,94% dari target 90,00% dengan capaian kinerja sebesar 102,15% (Sangat Memuaskan).
3. Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat I yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I terealisasi sebesar 99,30% dari target 90,00% dengan capaian kinerja sebesar 110,33% (Sangat Memuaskan).
4. Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat I terealisasi 100% dari target 90% dengan capaian kinerja sebesar 111,11% (Sangat Memuaskan).
5. Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat I terealisasi sebesar 97,46% dari target sebesar 90,00% dengan capaian kinerja sebesar 108,29% (Sangat Memuaskan).
6. Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat I terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat I terealisasi sebesar 3,27 dari target sebesar 3,25 dengan capaian kinerja sebesar 100,61% (Sangat Memuaskan).



Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Inspektorat I menunjukkan kinerja yang **SANGAT MEMUASKAN**.

Tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain.

1. Pada aspek perencanaan masih terdapat kelemahan dalam penyusunan Rencana Operasional Pengawasan (RO), yaitu masih berubah-ubah karena adanya perubahan kebijakan yang sifatnya mendesak sesuai atensi pimpinan, sehingga berpengaruh terhadap kualitas tim dan menghambat pengelolaan keuangan.
2. Belum terdapat koordinasi yang baik antara auditor internal dan eksternal terkait tindaklanjut hasil pengawasan yang menyebabkan berulangnya permintaan *evidence* hasil tindak lanjut pada auditan/obrik.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Inspektorat I di masa mendatang perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Menerapkan SOP penyusunan Rencana Operasional Pengawasan yang ditetapkan oleh Inspektur I.
2. Untuk mempercepat pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan, Inspektorat I akan melakukan percepatan dan pemutakhiran data hasil pengawasan setiap triwulan, serta menugaskan masing-masing tim untuk memantau rekomendasi yang telah dihasilkan dan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Inspektur I



Andry Asmara, SE, MM
NIP. 197312141994031001



Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Inspektorat I menunjukkan kinerja yang **SANGAT MEMUASKAN**.

Tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain.

1. Pada aspek perencanaan masih terdapat kelemahan dalam penyusunan Rencana Operasional Pengawasan (RO), yaitu masih berubah-ubah karena adanya perubahan kebijakan yang sifatnya mendesak sesuai atensi pimpinan, sehingga berpengaruh terhadap kualitas tim dan menghambat pengelolaan keuangan.
2. Belum terdapat koordinasi yang baik antara auditor internal dan eksternal terkait tindaklanjut hasil pengawasan yang menyebabkan berulangnya permintaan *evidence* hasil tindak lanjut pada auditan/obrik.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Inspektorat I di masa mendatang perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Menerapkan SOP penyusunan Rencana Operasional Pengawasan yang ditetapkan oleh Inspektur I.
2. Untuk mempercepat pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan, Inspektorat I akan melakukan percepatan dan pemutakhiran data hasil pengawasan setiap triwulan, serta menugaskan masing-masing tim untuk memantau rekomendasi yang telah dihasilkan dan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Inspektur I



Andry Asmara, SE, MM
NIP. 197312141994031001

